

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

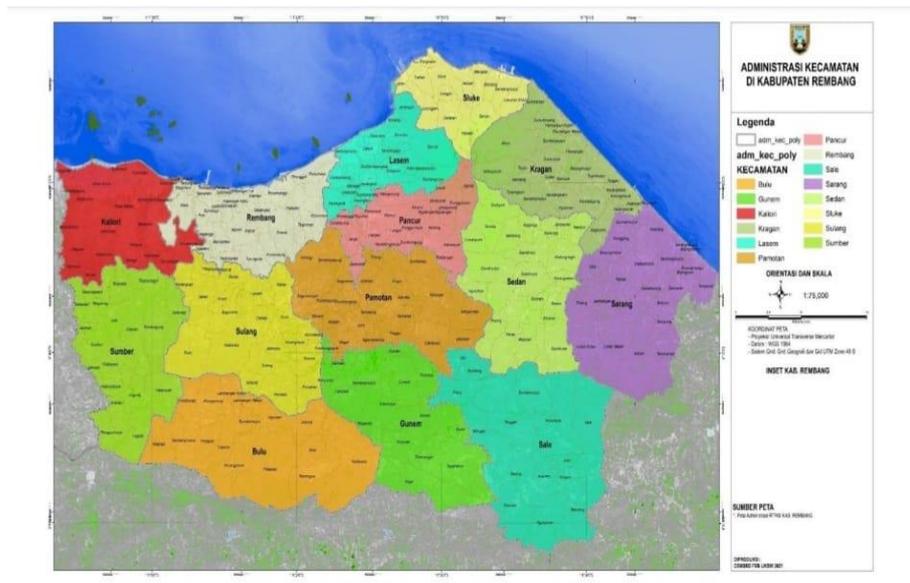
Kekayaan Sumber daya alam (SDA) yang dimiliki negara Indonesia sangatlah menjanjikan serta menguntungkan untuk berbagai sektor, roda perjalanan pembangunan di negara Indonesia pun tidak bisa dihentikan terkhusus dibidang perindustrian dan pertambangan, hal inilah yang membuat resiko timbulnya konflik perbedaan sangat berpotensi terjadi di berbagai lingkup seperti ekonomi, politik, juga sosial masyarakat beserta lingkungan sekitarnya. Dalam proses pembangunan sektor industri dengan case pertambangan di Kabupaten Rembang memancing gejolak baru permasalahan mengenai kerusakan lingkungan akibat pencemaran serta potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor serta kekeringan. adapun data presentase pencemaran yang disebabkan oleh dampak penambangan di kabupaten rembang Berdasarkan survei wahana lingkungan hidup Indonesia (WALHI), setidaknya 70% dampak tambang mencemari air permukaan, 65% mencemari air tanah, 50% mencemari tanah, 35% berdampak terhadap kesehatan manusia, 25% menyebabkan kerusakan tumbuhan dan 20% menyebabkan pencemaran udara.(Faperta, 2015)

Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Yang secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang merupakan bagian dari Pegunungan Kapur yang terletak di sebelah Utara. Kabupaten Rembang meliputi 14 kecamatan, 7 kelurahan, dan 287

desa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk di kabupaten rembang mencapai 625.991 jiwa. Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 hektar meliputi lahan sawah seluas 29.058 hektar (28,65%), lahan non sawah seluas 39.938 hektar (39,38%). Hal ini terlihat melalui kontribusi sektor pertanian Kabupaten Rembang sebesar 45,58% pada tahun 2010. Berkat kontribusi yang signifikan tersebut produk beras di Kabupaten Rembang menjadi produk yang digemari serta menjadi komoditi besar diseluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Namun hal ini tidak lagi menjadi fokus dan beralih cerita ketika sebagian besar lahan pertanian warga di pegunungan kendeng mengalami eksploitasi oleh pembangunan pertambangan pabrik semen, alhasil produk komoditas rembang menurun secara signifikan dan sektor pertanian hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 25,58% terhadap kabupaten Rembang.(Pemerintah Kabupaten Rembang, 2018)

Gambar 1.1

Peta Administratif Kabupaten Rembang



Sumber. dpmpstsp.rembangkab.go.id/

Manusia dan alam adalah satu kesatuan dalam ekosistem maka dengan itu, pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam dengan baik merupakan salah satu faktor yang penting. Hal ini patut mendapat perhatian, namun sayangnya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seringkali acuh tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan dalam waktu jangka panjang seperti contoh perindustrian pembangunan tambang ini. Banyak industri pertambangan yang mengeksploitasi alam secara berlebihan. Yang mana dampak tersebut mempengaruhi ekosistem serta habitat alami yang ada, hal ini tentunya akan menimbulkan gangguan ketidak seimbangan fungsi lingkungan hidup serta manusia yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan. Dampak yang dapat dilihat secara nyata dari aktifitas penambangan adalah timbulnya pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah serta masih banyak resiko lainnya. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan jika tidak dipikirkan secara matang, dimana seluruh aktivitas manusia tentunya bertumpu

pada unsur unsur alam. Jika alam mengalami penurunan kualitas maka ketidakstabilan antara manusia dan alam akan terjadi.(Dewita, 2017)

Keberagaman pendapat masyarakat yang memperdebatkan baik buruknya pembangunan tambang pabrik semen ini menjadi sebuah kendala tersendiri, pihak yang setuju memiliki asumsi bahwa akan banyak lowongan pekerjaan baru yang tentu bisa dimanfaatkan peluang serta kesempatannya bagi keberlangsungan serta kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar pertambangan, sedangkan disisi lain pihak yang tidak setuju akan berasumsi mengenai dampak serta kerusakan yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar diantaranya, alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan industri, pencemaran lingkungan dari limbah hasil tambang juga dampak negatif bagi lingkungan lainnya. Tanggapan seperti itu menjadi salah satu penguat mengapa konflik dan Gerakan perlawanan masyarakat selalu mengiringi proses industrialisasi di negara Indonesia ini.(Ahid & Kurniawan, 2015)

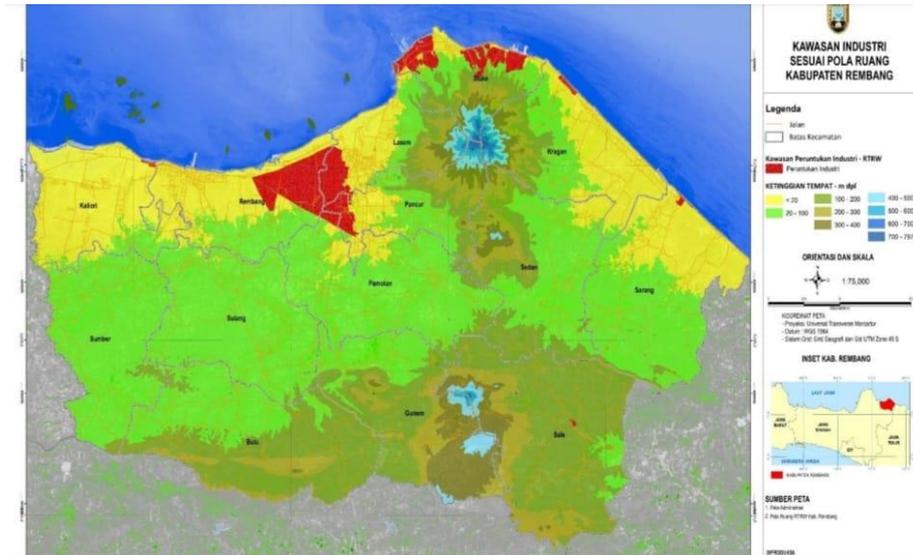
Dalam masalah ini adalah tidak hanya konflik dari dampak manusia serta lingkungan itu sendiri yang menjadi sorotan masalah utama yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 melainkan konflik sosial bermasyarakat juga harus diberi atensi lebih oleh pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait yakni konflik dari dampak pembangunan tambang batu kapur dimana konflik tidak hanya berangkat dari masyarakat kepada perusahaan dan pemerintah melainkan juga konflik timbul antar sesama individu juga kelompok masyarakat. Pemerintah Rembang yang memiliki peran sebagai penengah serta komunikator dalam sebuah konflik masyarakat sudah seharusnya dengan tanggap dan tepat sasaran meleraikan

permasalahan yang ada namun pada realitasnya peran pemerintah dalam menyelesaikan sebuah konflik masih jauh dari harapan, pemerintah sebatas penyelesaian konflik sementara dan jangka pendek Tanpa hasil yang signifikan dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat setelahnya. (Yulianus & Aituru, 2019)

Berawal pada hasil pertemuan presiden dengan para petani sekitar wilayah pegunungan kendeng juga masyarakat rembang yang berlangsung pada tanggal 02 agustus 2016 memberikan nafas baru bagi para petani dan masyarakat dimana dari pertemuan Bersama bapak presiden tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng perlu segera dilakukan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan dalam waktu satu tahun, proses KLHS akan menghentikan seluruh izin terkait. Artinya, sejak dikeluarkannya deklarasi ini, segala bentuk aktivitas di kawasan Pabrik Semen Rembang harus dihentikan, namun alih alih memberikan kesempatan masyarakat rembang bernafas lega, pada 09 November 2016 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan Keputusan Nomor 1 tentang Izin Lingkungan. Keputusan 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan untuk Perusahaan Bahan Baku Semen, Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Semen, berangkat dari sini berbagai konflik kembali menemani kehidupan masyarakat kendeng terkhusus wilayah rembang. (Kontras, 2014)

Gambar 1.2

Peta Peruntukan Kawasan Industri Kabupaten Rembang



Sumber. dpmptsp.rembangkab.go.id/

Dari berbagai gerakan penolakan masyarakat yang dilakukan masih banyak pertanyaan pertanyaan akar rumput dari pemerintah itu sendiri salah satu contohnya seperti “surat izin yang mengeluarkan bupati tapi mengapa melakukan aksi di kantor gubernur” hal itu sangat menunjukkan lemahnya peran pemerintah yang belum sepenuhnya paham terkait perbedaan antara persoalan public juga privat dan itulah yang menimbulkan rasa ketidak puasn masyarakat terhadap sosok yang tentu sangat diharapkan pada penyelesaian masalah tersebut mulai dari kekosongan regulasi sampai dengan lambatnya pengesahan peraturan mengenai ekosistem kawasan karst di pegunungan kendeng yang sampai dipuncaknya kekecewaan masyarakat adalah dimana surat izin pembangunan dan pengoperasian tambang dikeluarkan secara tiba tiba oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu hal ini berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan putusan pada gugatan masyarakat, strategi strategi seperti

seperti ini memang umum dilakukan untuk menghindari serta memuluskan perjalanan dalam menggeruk kekayaan sumber daya alam yang ada . (Hendra Try Ardianto, 2015) dari sanalah konflik berbagai aspek serta gerakan perlawanan masyarakat semakin banyak terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana peran pemerintah dalam resolusi konflik akibat pembangunan pertambangan batu kapur di kabupaten rembang, akar terjadinya konflik pertambangan batu kapur, faktor apa saja yang menyebabkan konflik serta mengulik apakah skema pembangunan pertambangan memicu atau memproduksi sebuah konflik.

Berdasarkan hasil studi literature yang ada dari banyaknya penelitian yang mengambil studi kasus wilayah rembang, kendeng dan sekitarnya mayoritas peneliti berfokus pada perlawanan masyarakat terhadap rencana pembangunan pertambangan, yang mana masih sangat minimnya penelitian yang mengangkat terkait peran pemerintah setempat akan resolusi konflik dalam permasalahan tambang di rembang dalam penelitian ini memiliki fokus pada konflik pertambangan batu kapur serta peran pemerintah dalam menanganinya. Dan hal menarik yang lebih ingin peneliti telusuri dalam penelitian ini adalah terkait kohesi sosial masyarakat rembang yang sangat kental dengan adat istiadat yang sudah terbangun bertahun tahun bahkan puluhan tahun kebelakang lalu kemudian luntur dan memudar begitu saja yang mana hal ini de sebabkan oleh pertambangan rembang yang masuk kemudian memecah semuanya.

1.2.Rumusan Masalah

Regradasinya kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam menangani permasalahan serta konflik terutama dalam kasus pertambangan di wilayah rembang membuat peran pemerintah sebagai pusat kekuasaan informasi juga komunikasi yang berperan besar menjadi komunikator antar masyarakat perlu mendapat perhatian lebih lanjut terhadap peran tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Konflik Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam resolusi konflik Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Rembang?

1.3.Tujuan Penelitian

Adanya tuntutan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki setiap masyarakat terutama masyarakat kabupaten rembang di wilayah pegunungan kendeng dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tentram serta damai, penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor terjadinya konflik serta melihat peran pemerintah dalam resolusi konflik pertambangan batu kapur di Kabupaten Rembang.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki keunggulan teoritis dan praktis. Kepentingan teoritis mempunyai manfaat jangka panjang dalam mengembangkan teori, sedangkan kepentingan praktis mempunyai manfaat yang berdampak langsung pada komponen yang dipelajari. Keuntungan teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.a. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi justifikasi empiris akan peran pemerintah dalam menangani sebuah konflik, hasil penelitian ini harapannya dapat memperkuat teori serta konsep dalam efektifitas peran pemerintah terkhusus daerah Kabupaten Rembang dalam resolusi konflik pertambangan batu kapur di kabupaten rembang.

1.4.b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah:

- 1.) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas serta peran pemerintah daerah yang kehadirannya dapat terasa disisi masyarakat, terkhusus dalam membantu masyarakat dalam penyelesaian sebuah konflik baik konflik horizontal serta konflik vertikal.
- 2.) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan alternatif terkait efektivitas model peran pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam menangani sebuah konflik.
- 3.) Bagi Peneliti, manfaat penelitian ini bagi peneliti yakni meningkatkan pengalaman serta keterampilan dalam mengumpulkan segala informasi dalam penyusunan langkah resolusi konflik pemerintah kepada masyarakat terkhusus masyarakat di kabupaten rembang.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan 10 Literature Review berdasarkan artikel jurnal yang berbeda-beda namun saling berkesinambungan dengan dampak pertambangan pabrik semen di kabupaten rembang. Tinjauan Pustaka ini

bertujuan untuk mencari tahu letak persamaan dari penelitian yang akan dikaji serta berguna untuk menambah informasi serta data untuk mendapatkan pembeda dari kajian-kajian sebelumnya. Literature dalam kajian ini dibagi menjadi dua klasifikasi yakni: Kajian terkait Penambangan wilayah pegunungan kendeng (Rembang dan Pati) secara umum, dan yang kedua, kajian mengenai dampak pertambangan serta Gerakan masyarakat kendeng (Rembang dan Pati).

Literature yang mengkaji tentang Penambangan wilayah pegunungan kendeng (Rembang dan Pati) secara umum terdiri dari dua artikel jurnal yang dilakukan oleh (Irvan et al., 2008) dan (Ahid & Kurniawan, 2012). industri pertambangan mempunyai dampak berkala terhadap perpecahan sosial. Kohesi sosial terjalin antara pihak setuju dan pihak tidak setuju pertambangan. Sampai pada waktu ini, konflik sosial telah terbentuk (bersifat jangka panjang). Stabilitas tersebut didukung oleh keberagaman pendapat masyarakat terhadap keberadaan pertambangan, antara yang mendukung dan yang menentang. (Irvan et al., 2008). selain itu Hadirnya tambang menyebabkan pemerintah setempat yaitu pemdes memiliki pendapat yang berbeda dengan petani justru melakukan hal sebaliknya sehingga membuat petani merasa dirugikan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh elite desa yang tidak mewakili warga, seperti halnya penarikan surat penolakan tambang serta organisasi yang mewakili warga pendukung tambang, membuat ketegangan diantara warga. (Ahid & Kurniawan, 2012)

Pengelompokan Literature yang kedua membahas terkait mengenai dampak pertambangan serta Gerakan masyarakat kendeng (Rembang dan Pati) yang terdiri dari delapan artikel jurnal yakni: (Sulistyo Rini & Arsal Thriwaty,

2016), (Wulandari et al., 2019), (Harnanto et al., 2018), (Zuldin, 2019), (Nur Avid et al., 2013), (Rustiana, 2019), (Harsasto, 2020). Dari masing-masing pihak mempunyai pandangan berbeda terhadap pendirian tambang semen serta kawasan operasi yang nantinya digunakan PT. Semen Indonesia. Pihak-pihak yang bersengketa antara lain; PT. Semen Indonesia, pemerintah, LBH Semarang, JM-PPK, Walhi, kelompok pendukung masyarakat dan kelompok masyarakat menentang pembangunan pabrik tersebut. Konflik ini menyebabkan hancurnya kebersamaan masyarakat serta solidaritas kelompok yang mempunyai tujuan yang sama. Hasil review ini, peneliti memberikan saran mengenai adanya penelitian di berbagai bidang ilmu yang berkaitan akan konstruksi PT. Semen Indonesia serta menggerakkan pihak yang berkonflik agar mencari solusi dalam penyelesaian konflik tersebut. (Sulistyo Rini & Arsal Thriwaty, 2016) namun dibalik konflik yang terjadi di pegunungan kars kendeng terkait perubahan kebijakan dan pengadvokasiannya menyimpang dua kepercayaan yang fundamental didalam kehidupan masyarakat sekitar yaitu *belief system* dan *core belief* dimana *belief system* adalah kepercayaan bahwa sebuah industri hadir untuk membawa perubahan ekonomi bagi wilayah sekitar dan kebalikan dari *belief system*, *core belief* merupakan kepercayaan dimana lingkungan merupakan sumber dari segalanya maka dari itu lingkungan patut dijaga kelestariannya yang mana hal ini akan bertolak belakang jika adanya pembangunan sebuah industri terkhusus pabrik semen. (Wulandari et al., 2019)

Kasus pegunungan kendeng merupakan kasus pelanggaran HAM yang rumit dimana bantuan hukum structural sangat dibutuhkan dalam pemecahan masalah ini, Lembaga bantuan hukum atau LBH juga berperan sebagai penggerak sosial dalam keadilan sosial juga penegakan HAM

lainnya.(Harnanto et al., 2018) dan hal ini melahirkan *Social Movement* masyarakat kendeng dalam penolakan pembangunan pabrik semen merupakan buah dari perlawanan kaum samin di abad 20 dalam melawan pemerintah belanda pada saat itu yang mana dalam Gerakan penolakannya masyarakat melakukan mogok membayar pajak juga marginalisasi kelompok, hal ini menyebabkan diskriminasi kelompok pendukung pendirian tambang di wilayah kendeng. (Aziz & Falah, n.d.) namun dibalik hal tersebut Gerakan sosial ini mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Maitan. kemenangan perlawanan memberikan kepercayaan di antara individu. Gerakan protes juga meningkatkan keterlibatan terjadi antar anggota masyarakat dan pada saat yang sama timbul rasa saling percaya antar masyarakat yang bergabung dengan kelompok. Dalam aksi penolakan, jaringan bersifat nonformal Di kalangan aktivis, aksi ini mulai hadir di kelompok Maitan. Yang tersebar sebagian besar desa dan dusun, terdapat aktivis dari. Tradisi melindungi hak seseorang untuk hidup berdasarkan hukum nyatanya mulai dibangun. Dengan semangat yang sama, mayoritas orang mulai berpikir Bergabung dengan gerakan perlawanan untuk melindungi hak sesama.(Harsasto, 2020)

Tabel 1.1 Ringkasan Literature Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1.	Penambangan wilayah pegunungan kendeng (Rembang&Pati)	(Irvan et al., 2008) dan (Ahid & Kurniawan, 2012)	Industri pertambangan memiliki dampak yang cukup signifikan, baik dari dampak positif juga dampak negative, penambangan yang dilakukan perusahaan di

			<p>Kawasan kendeng terkhusus kabupaten rembang memiliki dampak negative jauh lebih tinggi dibanding dampak positive mulai dari dampak lingkungan juga sosial masyarakat yang akan ikut menjadi korban dari adanya pembangunan tambang.</p>
2.	<p>Dampak pertambangan serta Gerakan masyarakat kendeng (Rembang&Pati)</p>	<p>(Sulistyo Rini & Arsal Thriwaty, 2016), (Wulandari et al., 2019), (Harnanto et al., 2018), (Zuldin, 2019), (Nur Avid et al., 2013), (Rustiana, 2019), (Harsasto, 2020)</p>	<p>Dari banyaknya dampak tersebut tidak menutup masyarakat untuk memiliki pandangannya sendiri terkait penambangan tersebut dan hal ini merupakan salah satu pemicu konflik antar masyarakat serta golongan yang ada di wilayah pegunungan kendeng terkhusus kabupaten rembang. Gerakan perlawanan dari masyarakat pun mulai bermunculan semenjak rencana pembangunan tambang di canangkan, Gerakan masyarakat yang muncul dalam aksi</p>

			<p>penolakan tidak hanya berpengaruh pada pembangunan tambang melainkan berpengaruh juga terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar baik dari pengaruh yang baik seperti meningkatnya solidaritas sampai dampak buruknya yaitu adanya sentimental antar masyarakat dalam perbedaan pendapat terkait pembangunan pabrik.</p>
--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas pembangunan pertambangan di wilayah rembang dan sekitarnya selain menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan juga menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat juga kehidupan disekitarnya hal ini ditimbulkan dari berbagai kepentingan juga pemikiran, adanya konflik yang terjadi pun melahirkan banyak Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari pihak pro juga kontra, Gerakan perlawanan masyarakat ini memiliki fokus serta tujuan yang bermacam macam mulai dari perlindungan hak, pertahanan lingkungan, juga tuntutan keadilan, masuknya industri pertambangan ke wilayah rembang pun membuat regradasi peran yang ditunjukkan oleh pemerintah setempat, perhatian pemerintah jauh tertuju pada perusahaan dibandingkan dengan aspirasi masyarakat setempat,

hal ini pula salah satu penyebab dari timbulnya konflik yang terus berlangsung sampai saat ini, namun dengan adanya Gerakan masyarakat dalam melawan pertambangan ini memiliki pengaruh yang baik yakni dalam Hubungan sosial pada masyarakat. Studi literature pun menggambarkan bahwa penjabaran terkait faktor faktor terjadinya konflik serta peran pemerintah dalam menangani konflik ini belum cukup di banyak diteliti juga disoroti terkait urgensinya serta keberadaannya di lingkungan masyarakat terkhusus di Kabupaten Rembang.

KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka Dasar Teori merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya. (Raden Intan, 2019)

1.6 Teori Politik Lingkungan

Teori politik lingkungan merupakan salah satu cabang teori politik yang fokus pada hubungan antara politik dengan lingkungan alam. Beberapa ahli telah mengembangkan berbagai teori politik lingkungan untuk menjelaskan peran politik dalam permasalahan lingkungan hidup. Teori politik lingkungan berisi kumpulan pandangan dan gagasan tentang bagaimana politik mempengaruhi isu-isu lingkungan dan bagaimana isu-isu lingkungan mempengaruhi politik. Menurut Robbins (2019) Teori politik lingkungan dalam kajian ekologi politik menekankan pada peran kekuatan politik dan ekonomi dalam mendorong perubahan lingkungan. Teori ini mengkaji

bagaimana struktur ekonomi kapitalis dan hubungan kekuasaan mempengaruhi perubahan lingkungan. Teori politik lingkungan juga menekankan pentingnya menganalisis bagaimana kekuatan eksternal seperti proyek pembangunan internasional dan program modernisasi ekonomi berkontribusi pada restrukturisasi kehidupan dan lingkungan lokal di negara-negara berkembang. Teori ini juga menekankan pentingnya menghubungkan analisis pada tingkat lokal, regional, dan global untuk memahami proses dan dampak perubahan lingkungan. (Roberts, 2020)

Menurut Piers Blaikie (1985), teori politik lingkungan merupakan suatu pendekatan yang mempelajari hubungan antara kekuasaan politik, alokasi sumber daya dan perubahan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya faktor politik dalam memahami perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat. teori politik lingkungan juga mencakup isu-isu seperti keadilan sosial keberlanjutan dan etika lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori ini tidak hanya mempertimbangkan aspek politik tetapi juga aspek sosial dan etika yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam penelitiannya, Blaikie juga memasukkan pendekatan postmodernis untuk memahami perubahan lingkungan global. Pendekatan ini menciptakan kompleksitas dan keragaman dalam hubungan antara manusia dan lingkungan, serta pentingnya mempertimbangkan perspektif lokal dalam analisis kebijakan lingkungan. Blaikie juga menyoroti isu-isu seperti degradasi lahan, erosi tanah, dan keberlanjutan pertanian. Ia menekankan pentingnya memahami faktor politik untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut. Singkatnya, teori politik lingkungan menurut Piers Blaikie merupakan suatu pendekatan yang mempelajari hubungan antara kekuasaan

politik, alokasi sumber daya dan perubahan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya faktor politik, sosial, dan etika dalam memahami dan memecahkan masalah lingkungan. (Simon, 2008) Piers Blaikie dalam penelitiannya menggunakan beberapa indikator untuk teori politik lingkungan, antara lain:

1. Kekuasaan politik: Blaikie menekankan pentingnya memahami bagaimana kekuasaan politik mempengaruhi pengambilan keputusan terkait lingkungan. Indikator ini mencakup analisis kebijakan, distribusi kekuasaan, dan pengaruh politik dalam pengelolaan sumber daya.
2. Distribusi sumber daya: Blaikie menyoroti pentingnya memahami bagaimana distribusi sumber daya mempengaruhi perubahan lingkungan. Indikator ini mencakup analisis ketimpangan sosial-ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan konflik atas penggunaan sumber daya.
3. Perubahan lingkungan: Blaikie mempelajari dampak perubahan lingkungan terhadap masyarakat dan bagaimana faktor politik mempengaruhi perubahan tersebut. Indikator ini mencakup analisis degradasi lingkungan, erosi tanah, dan perubahan iklim.
4. Keadilan sosial: Blaikie juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam analisis politik lingkungan. Indikator ini mencakup analisis ketimpangan distribusi sumber daya, akses terhadap kebijakan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitiannya, Blaikie menggunakan indikator-indikator ini untuk memahami hubungan antara kekuasaan politik, distribusi sumber daya, dan perubahan lingkungan. Ada pula sejumlah faktor lokal yang berkontribusi terhadap perubahan lingkungan. Seperti proses mengungkapkan pendapat dalam

suatu kelompok atau komunitas yang berkecukupan; adanya lembaga lokal (seperti sistem hukum formal dan hukum informal) yang menghalangi akses dan kontrol atas pemanfaatan sumberdaya bagi individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Selain itu ada pula faktor eksternal lain yang mempengaruhi kondisi lokal seperti kebijakan pemerintah mengenai penggunaan lahan serta pengawasan sumber-sumber alam yang ada dan komitmen para aktor terkait kebijakan mengenai akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan lingkungan lokal dalam konteks tertentu adalah hasil dari berbagai faktor yang sangat kompleks.

1.7 Resource Curse Theory

Teori kutukan sumber daya alam dikembangkan oleh Richard Auty (1993) teori ini bermula dari kecenderungan negara-negara yang kaya akan sumber daya alam menjadi terlalu bergantung pada sektor sumber daya alam dan ketatnya persaingan politik untuk memperoleh kekayaan tersebut. Pemerintah Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah cenderung memiliki kinerja buruk dibidang pembangunan politik itu sendiri dibandingkan pembangunan dalam hal lainnya. (Sholikin, 2020) Adapun fenomena yang mendukung lahirnya teori ini adalah Salah satu contoh dari teori kutukan sumber daya alam negara-negara di Afrika yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan mineral. Studi yang dilakukan oleh Sachs dan Warner (1995) menunjukkan bahwa negara-negara ini cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang sumber daya alamnya lebih kecil. Mereka menemukan bahwa ketergantungan pada sumber daya alam

dapat menghambat diversifikasi ekonomi, meningkatkan ketimpangan pendapatan, dan memperburuk tata kelola pemerintahan negara tersebut.

Dalam teori kutukan sumber daya alam, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis dampak sumber daya alam terhadap pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Beberapa indikator yang umumnya digunakan dalam Teori ini antara lain:

1. Ketergantungan pada sumber daya alam: Indikator ini mengukur sejauh mana suatu negara bergantung pada ekspor sumber daya alam, seperti minyak, gas, atau mineral. Ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam dapat menjadi indikator adanya potensi kutukan sumber daya alam.
2. Pendapatan dari sumber daya alam: Indikator ini mengukur besarnya pendapatan yang diperoleh dari ekspor sumber daya alam. Pendapatan yang tinggi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan distribusi kekayaan di negara tersebut.
3. Korupsi: Indikator ini mengukur tingkat korupsi di negara yang kaya sumber daya alam. Korupsi seringkali terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang buruk dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
4. Ketimpangan ekonomi: Indikator ini mengukur tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di negara yang kaya sumber daya alam. Ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan konflik sosial dan politik.
5. Kualitas institusi: Indikator ini mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk keterlibatan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kualitas institusi yang buruk dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan konflik.

1.8 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan Batasan akan pengertian yang diberikan oleh peneliti terhadap variabel serta konsep yang hendak diukur, diteliti, dan digali informasinya, konsep terkait akan dijadikan pedoman dalam mengoperasionalkan data dilapangan, yang harapannya dapat memudahkan dalam memahami kontekstualisasi terkait teori yang digunakan. definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1.8.a. Politik Lingkungan

Politik lingkungan merujuk pada upaya dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan alam serta isu-isu lingkungan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, partai politik, kelompok advokasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Politik Lingkungan Ini mencakup pemahaman dan pengaturan masalah lingkungan, pembuatan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan, serta interaksi antara pemimpin politik, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Politik lingkungan juga dapat mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, keberlanjutan, energi terbarukan, limbah, dan masih banyak lagi. Para pemimpin politik dan pengambil kebijakan harus membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang serta memastikan bahwa sumber daya alam dijaga dan dikelola dengan sebaik mungkin untuk generasi mendatang. Dalam banyak kasus, politik lingkungan melibatkan negosiasi kompleks antara berbagai kepentingan, baik

ekonomi maupun lingkungan, guna mencapai keseimbangan yang tepat. ketika politik lingkungan dijalankan dengan baik, hal itu dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan planet bumi ini dan melindungi lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang.

1.8.b. Resource Curse Theory

Teori Kutukan Sumber Daya (*Resource Curse Theory*) adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi dan ilmu politik yang menyatakan bahwa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan logam berharga sering mengalami masalah ekonomi dan politik yang serius, meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah. Teori ini juga dikenal dengan sebutan "the paradox of plenty" atau paradoks kelimpahan.

1.9 Definisi Operasional

Definisi operasional penting dalam menentukan indikator untuk menyelesaikan penelitian ini. Dengan definisi operasional, peneliti dapat menggunakan pedoman yang ada untuk mengkaji permasalahan tersebut. Hal ini tentunya akan membantu peneliti mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikannya dengan lebih mudah. Berikut definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1.2 Indikator Teori

No.	Landasan Teori	Variabel	Indikator
1.	Teori Politik Lingkungan Menurut Piers Blaikie (1985)	Access	1. Distribusi SDA: a. Ketimpangan Sosial-Ekonomi b. Akses Terhadap SDA
			2. Dampak Perubahan Lingkungan

		Control	1. Kekuasaan Politik
			2. Gerakan Masyarakat (<i>Social Movement Organization</i>)
2.	<i>Resource Curse Theory</i> Menurut Richard Auty	Kualitas Institusi	1. Keterlibatan Peran Pemerintah

METODE PENELITIAN

Kerangka teori menjadi salah satu pendukung dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan kerangka teori merupakan wadah yang didalamnya dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. kerangka teori adalah suatu wadah yang menjelaskan tentang variabel-variabel dan permasalahan-permasalahan pokok yang terlibat dalam suatu penelitian. Teori-teori tersebut dapat dijadikan acuan untuk pembahasan lebih lanjut. Dengan cara ini, kerangka teori dibuat sehingga penelitian ini dapat diasumsikan akurat.

1.10 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, menurut Denzin dan Loncoln (1987) penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan data dalam *Real Life* dengan maksud menafsirkan kejadian atau fenomena yang ada menggunakan berbagai pendekatan.(Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, 2018) Alasan peneliti menggunakan metode ini pada penelitian kali ini adalah peneliti ingin mendeskripsikan keadaan atau kondisi lapangan secara lebih spesifik, transparan, serta mendalam.

1.11 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih peneliti dalam menjalankan penelitiannya, lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan selama penelitian, adapun yang menjadi lokasi penelitian pada penelitian ini adalah desa Tegaldowo, kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

1.12 Unit Analisa

Tabel 1.3 Unit Analisa Data

No.	Lokasi	Jumlah	Narasumber
1	Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang	2	Masyarakat Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang
2.	Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang	2	Petani Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang
3.	Jaringan Masyarakat Peduli Pegunaungan Kendeng	1	Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunaungan Kendeng

1.13 Data dan Sumber Data

1.13.a Data Skunder

Data Skunder atau data pendukung yang digunakan pada peneitian ini didapatkan melalui informasi online yang terpublish di website, berita online, juga artikel jurnal.

Tabel 1.4 Data Sekunder

No.	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Jumlah masyarakat yang terdampak pertambangan Batu Kapur Kabupaten Rembang	Pemerintah Kabupaten Rembang	Dokumentasi
2.	Data dan kegiatan Pemerintah terhadap pertambangan batu kapur (Monitoring, Evaluasi, Mediasi)	Pemerintah Kabupaten Rembang	Dokumentasi
3.	Data dan kegiatan Gerakan masyarakat terhadap pertambangan batu kapur.	Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng	Dokumentasi

1.13.b. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara bersama pihak pihak terkait seperti Pemerintah Kabupaten

Rembang, Tokoh Gerakan juga masyarakat di desa Tegaldowo yang terdampak konflik dari sudut pandang masing masing.

Tabel 1.5 Data Primer

No.	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Peran Pemerintah dalam Resolusi Konflik Pertambangan Batu Kapur Kabupaten Rembang	Masyarakat Desa Tegaldowo Kabupaten Rembang	Wawancara
2.	Akses Distribusi Sumber Daya Alam Terhadap Aspek Sosial-Ekonomi	Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)	Wawancara
3.	Dampak Perubahan Lingkungan Terhadap Masyarakat Serta Bagaimana Faktor Politik Mempengaruhi Perubahan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Kapur	Tokoh Masyarakat Kabupaten Rembang	Wawancara

	Kabupaten Rembang		
4.	Peran Gerakan Masyarakat menolak pertambangan Batu kapur terhadap Kontrol sumber daya alam	Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK)	Wawancara

1.14 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan peneliti dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh untuk dijadikan data dalam penelitian., Tenik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. **Observasi**, yakni suatu aktifitas atau kegiatan yang mana bertujuan untuk merasakan atau memahami suatu kondisi serta fenomena agar mendapatkan informasi informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. observasi dikaukan secara mendalam mengenai konflik Pertambangan Batu Kapur yang terjadi di wilayah Rembang.
2. **Wawancara**, merupakan percakapan antara dua orang atau lebih antara peneliti serta pihak terkait dalam penelitian, wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada pihak yang memiliki informasi seputar hal yang di teliti oleh peneliti.

Tabel 1.6
Data Narasumber

No.	Narasumber	Jumlah
1.	Pak. Guretno	1

2.	Pak. Joko Prianto	1
3.	Kartini Kendeng	1
4.	Petani	2
5.	Warga	2

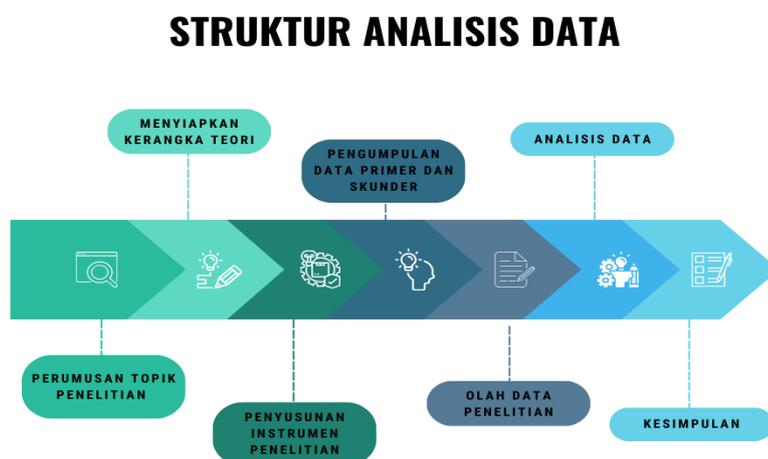
3. Dokumentasi, adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi dimana penyediaan dokumen dokumen yang berisikan sumber-sumber informasi pendukung penelitian serta pengumpulan dokumentasi selama proses penelitian berlangsung.

1.15 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengklasifikasikan data dan menjadikannya lebih spesifik dan rinci. Hal ini dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat dipahami oleh pembaca dan hasil yang diperoleh dapat dengan mudah dikomunikasikan kepada orang lain. (Al-Hamdi et al., 2020)

Proses analisis data dilakukan melalui tujuh tahap yaitu:

Gambar 1.3
Langkah Analisis Data



Sumber. Diolah Oleh Peneliti

a. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder

Pada tahap ini setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan proses selanjutnya merupakan transkripsi rekaman hasil wawancara ke dalam format teks. Data yang dikumpulkan, baik dari wawancara maupun data lapangan, akan diseleksi dan diolah menurut indikator atau alat pengukuran yang telah diidentifikasi atau ditetapkan.

b. Olah data

Langkah ini mencakup kegiatan memilih data yang relevan dan berguna dalam proses analisis. Selain itu, data yang kurang relevan dengan topik penelitian akan dihilangkan.

c. Analisis data

Setelah melalui tahap pemilihan data, langkah selanjutnya adalah menghubungkan hasil variabel yang satu dengan variabel yang lain. Selain itu, ada langkah penting lainnya yaitu verifikasi data. Proses ini dilakukan jika peneliti mendeteksi adanya ketidaksesuaian data, yang sebaiknya dikonfirmasi kepada pihak terkait agar keabsahan analisis dapat ditinjau kembali.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses akhir dari tahapan penelitian setelah seluruh data dan informasi yang didapatkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.